

# PERAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KUALITAS AUDIT DAN PRAKTIK CG NEGARA DALAM TAX AVOIDANCE

*Jenis Sesi Paper: Full paper*

**Sabar Warsini**

Politeknik Negeri Jakarta

[sabarwarsini@yahoo.com](mailto:sabarwarsini@yahoo.com); [sbw.pringgo@gmail.com](mailto:sbw.pringgo@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to obtain empirical evidence of the role of corporate governance practices in the act of tax avoidance. The study was conducted with a cross-country data covering publicly traded companies in the five Asian countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. By using a panel data for 3 years (2010-2012) 2453 firm years obtained as final sample. Hypothesis testing used fixed effect models. Corporate governance practices at the company level was measured using institutional ownership and audit quality, while the corporate governance practices at the country level were measured by a score of CG market CLSA survey. The test results obtained are: 1). Institutional ownership has significantly positive effect on tax avoidance as measured by discretionary permanent book-tax differences, but did not significantly affect the discretionary total book-tax differences. 2). Audit quality has significantly negative effect on tax avoidance. 3). At the state level there is evidence that companies domiciled in countries running corporate governance practices get better and tend not to perform tax avoidance. It can be concluded that the practice of good corporate governance can play an exercised control role over the company's management not to perform tax avoidance.*

*Keywords: institutional ownership, audit quality, corporate governance market, tax avoidance*

## **1. Pendahuluan**

Beban pajak merupakan beban yang sangat signifikan bagi perusahaan. Chen et al., (2010) menyatakan bahwa beban pajak merupakan beban yang sangat signifikan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, karena dengan menyerahkan sebagian laba operasional yang diperoleh kepada negara berarti akan mengurangi laba sesudah pajak yang menjadi hak bagi pemilik perusahaan. Penghindaran pajak nampaknya sudah menjadi fenomena umum. Shackelford dan Shevlin (2001) melakukan studi penelusuran terhadap penelitian bidang pajak sejak tahun 1970 an hingga tahun 2000 menemukan bukti bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang ditunjukkan

dengan perilaku pelaporan laba untuk tujuan pajak (*tax reporting*) lebih rendah dibandingkan pelaporan laba akuntansi (*financial reporting*).

Hanlon dan Heitzman (2010) juga melakukan *review* penelitian bidang pajak yang cakupannya lebih luas dibandingkan Shackelford dan Shevlin (2001). Hanlon dan Heitzman (2010) mengintegrasikan antara teori dan riset perpajakan dari bidang akuntansi, ekonomi dan keuangan. Salah satu fokusnya adalah *corporate tax avoidance*. Didalam *review*, Hanlon dan Hetzman (2010) mengemukakan bahwa *corporate tax avoidance* telah menjadi topik riset yang sangat luas mencakup: teori, pengukuran, diterminan dan konsekuensi dari *corporate tax avoidance*. Yang menarik dari *review* Hanlon dan Heitzman (2010) adalah ditemukannya perkembangan teori baru yang menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah masalah keagenan (*agency problems*).

Slemrod (2004), Crocker dan Slemrod (2005) telah meletakkan teori dasar untuk memahami *corporate tax avoidance* dalam kerangka keagenan dengan meneliti hubungan antara kompensasi eksekutif (*CFO* dan *tax director*) terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan siapa yang akan menanggung risiko penalti atas pelanggaran pajak apakah pemilik ataukah manajemen. Adanya pemisahan antara pemilik dan kontrol membawa implikasi bahwa tindakan *tax avoidance* menyangkut aktivitas yang kompleks. Pemilik harus yakin bahwa tindakan manajemen dalam efisiensi pajak benar benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemilik, bukan semata untuk keuntungan manajemen sebagai agen.

Perspektif lain dikemukakan oleh Desai dan Dharmapala (2006) yang menemukan bahwa pada perusahaan dengan praktik *corporate governance* yang tidak baik (*poorly-governed*) ditemukan adanya hubungan negative antara kompensasi manajemen dengan *tax sheltering*. Akan tetapi tidak signifikan untuk perusahaan yang *well-governed*, yang berarti pada perusahaan yang *well-governed*, pemegang saham tidak menginginkan manajemen melakukan penghindaran pajak karena meskipun membawa keuntungan tetapi nantinya manajemen melakukan lebih untuk keuntungan pribadi. Temuan ini kemudian diperkuat oleh Desai dan Dharmapala (2007) yang menyatakan bahwa pada situasi dimana manajemen mempunyai kepentingan pribadi yang sangat kuat, maka manajemen akan melakukan diskresi transaksi secara kompleks untuk tujuan penghindaran pajak dan bahkan

mengalihkan/menyelewengkan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemilik perusahaan.

Guna mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dengan agen, maka diperlukan adanya penerapan praktik *corporate governance* yang baik. Dengan menggunakan konsep dasar bahwa *tax avoidance* adalah masalah keagenan, maka perkembangan riset selanjutnya bertujuan melakukan pengujian pengaruh praktik *corporate governance* terhadap *tax avoidance* seperti: pengaruh *board structure* (Minnick dan Noga, 2010; Richardson dan Lanis, 2013), pengaruh *independency board* (Lanis dan Richardson, 2011; Richardson et al., 2014), pengaruh *family ownership* (Koh dan Han, 2010; Chen et al., 2010), dan pengaruh *institutional ownership* (Moore, 2012). Secara umum hasil riset dapat disimpulkan bahwa praktik *corporate governance* yang baik mampu menurunkan diskresi manajemen dalam penghindaran pajak.

Meskipun telah banyak penelitian yang menguji pengaruh praktik *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, namun penelitian tersebut pada umumnya tidak dilakukan dengan data lintas negara, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah selain karakteristik perusahaan itu sendiri, karakteristik negara juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk memperoleh bukti empiris atas pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan menggunakan data lintas negara.

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dimana praktik *corporate governance* diukur dengan praktik *corporate governance* tingkat perusahaan dan praktik *corporate governance* tingkat negara. Praktik *corporate governance* tingkat perusahaan diukur dengan kepemilikan institusional dan kualitas audit yang mencerminkan mekanisme monitoring eksternal, dan pada tingkat negara menggunakan ukuran skor *corporate governance* pasar hasil survey dilakukan oleh *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) dan *The Asian Corporate Governance Association* (ACGA). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris: 1). Apakah kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai mekanisme monitoring eksternal efektif menurunkan diskresi manajemen perusahaan dalam penghindaran pajak?, 2). Apakah praktik CG suatu negara berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan?

## 2. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dalam literature strategi bisnis dan perpajakan, Scholes et al. (2005) membangun suatu kerangka konseptual untuk perencanaan pajak yang efektif yakni harus mencakup: *all parties*, *all taxes* dan *all costs*. Perencanaan pajak harus dilakukan secara hati-hati dan paham betul terhadap aturan perpajakan supaya tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dalam banyak literature sering tidak membedakan antara manajemen pajak, perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Darussalam et al. (2010) membedakan skema penghindaran pajak menjadi 2 yakni: penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*), yang pada umumnya melanggar ketentuan.

Berbagai istilah sering digunakan untuk menggambarkan perilaku penghindaran pajak seperti: *tax aggressiveness*, *tax shelter*, *tax avoidance*, *tax evasion*, *tax management* dan *tax noncompliance*). Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan *loophole* peraturan pajak yang meskipun dilakukan secara legal akan tetapi seringkali mendapat sorotan kurang baik dari otoritas pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Hanlon dan Heitzman (2010) yang mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi pajak eksplisit atau merefleksikan semua transaksi yang memiliki efek terhadap pengurangan kewajiban pajak eksplisit perusahaan.

### 2.2. Hubungan Corporate Governance dan Tax Avoidance

*Corporate Governance* secara umum didefinisikan sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan jalannya suatu perusahaan (Friese et al., 2006). Pengukuran penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran. Interaksi antara CG dengan perpajakan dapat merujuk pada prinsip dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai berikut:

*“Corporate Governance requirements and practices are typically influenced by an array of legal domains such as: company law, securities regulations, accounting and auditing standards, insolvency law, contract law, labor law, and tax law. Under this circumstances there is a risk that the variety of legal influences may cause unintentional overlaps and even conflicts, which may frustrate the ability to pursue key corporate governance objectives”*

Berdasarkan pada prinsip tersebut maka penting untuk melihat interaksi *corporate governance* dengan berbagai peraturan termasuk pajak. Tindakan manajemen sebagai agen, dalam perencanaan pajak tidak terlepas dari mekanisme dan praktik *corporate governance* perusahaan seperti pengawasan, pengendalian dan transparansi. Beale (2004) menyatakan bahwa dengan meningkatkan transparansi dan kontrol melalui prosedur *corporate governance* perusahaan diharapkan secara otomatis menghentikan perencanaan pajak yang tidak diinginkan. Pada level negara, Desai, Dyck dan Zingales (2007) menjelaskan bahwa peningkatan tarif pajak korporasi hanya akan meningkatkan pendapatan pajak negara pada negara-negara dengan *corporate governance* yang kuat.

Praktik *corporate governance* pada dasarnya menyangkut 2 aspek yakni: (1). *Governance structure* atau *board structure* yang mencerminkan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ perusahaan yaitu pemegang saham, komisaris, direksi dan manajemen, dan (2). *Governance process* terkait mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ perusahaan seperti pengendalian dan monitoring. Berbagai variabel yang digunakan sebagai ukuran praktik *corporate governance* adalah terkait pengawasan internal (independensi dewan komisaris, efektifitas komite audit) dan pengawasan eksternal (investor institusional, kualitas audit).

### 2.3. Peran Kepemilikan Institusional dalam Mengendalikan Tax Avoidance

Dalam mekanisme *corporate governance* kepemilikan institusional (*institutional ownership*) merupakan salah satu bentuk mekanisme monitoring eksternal. Pendapat umum sering menyebut investor institusional adalah investor yang canggih (*sophisticated investors*). Mereka mempunyai informasi yang lebih unggul dibandingkan investor non-institusional, mereka juga mempunyai kemampuan analisis yang lebih kuat terhadap fundamental suatu perusahaan maupun industri sehingga investor institusional lebih mampu untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang dibandingkan investor lainnya. Selain faktor *sophisticated*, investor institusional pada umumnya menginvestasikan dana dalam jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya mereka melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen perusahaan.

Pengaruh langsung kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* belum banyak dilakukan pengujian. Moore (2012) menguji pengaruh tingkat kepemilikan institusional terhadap variabilitas

*book-tax differences*. Dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Schleifer dan Vishny (1997) bahwa investor institusional mempunyai insentif dan kemampuan yang lebih baik untuk mengawasi kegiatan manajemen maka investor institusional merupakan bentuk mekanisme pengawasan yang kuat dan dapat meningkatkan *corporate governance* secara keseluruhan. Moore (2012) mampu membuktikan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negative terhadap *book-tax differences* dan pengaruh negative lebih kuat terhadap *permanent book-tax differences*. Pengaruh tidak langsung kepemilikan institusional dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006), dimana kepemilikan institusional digunakan sebagai ukuran kuat lemahnya mekanisme pengawasan dalam praktik *corporate governance*, dan membuktikan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar manajemen cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan peran investor institusional sebagai pihak eksternal yang mampu melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajemen maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional semakin bisa menekan manajemen untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance***

#### 2.4. Peran Auditor dalam Mengendalikan Tax Avoidance.

Selain investor institusional, pengawasan terhadap manajemen perusahaan juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal lainnya yaitu auditor eksternal. Kualitas audit sangat sulit untuk diukur. Pengukuran kualiti audit bisa mengacu pada teori kualitas audit oleh De Angelo (1981) yang menyebutkan “*the quality of audit services is defined to be market assessed joint probability that a given auditor will both: (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach*”. Probabilitas auditor untuk menemukan pelanggaran/kecurangan tergantung pada kapabilitas auditor, prosedur audit dan luasnya sampel, sedangkan probabilitas auditor melaporkan pelanggaran/kecurangan tergantung pada tingkat independensi auditor terhadap klien, oleh karena itu banyak riset kemudian menggunakan kapabilitas dan independensi auditor sebagai ukuran kualitas audit yang direfleksikan dalam ukuran dan reputasi auditor (*Big4/Nonbig4*). Apabila mengacu pada

teori akuntansi positif oleh Watt dan Zimmerman (1986) skala auditor dan spesialisasi industri auditor merupakan proksi kualitas audit, auditor yang melakukan konsentrasi pada industri tertentu dan melakukan prosedur audit tertentu memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan industri klien dengan lebih baik sehingga dapat bekerja lebih efektif.

Sepanjang penelusuran literature penelitian yang menguji pengaruh langsung kualitas audit terhadap penghindaran pajak belum ditemukan. Penelitian yang sudah ada lebih kepada peran auditor dalam perencanaan pajak berkaitan dengan jasa perpajakan yang diberikan oleh auditor kepada perusahaan kliennya. McGuire et al. (2012) membagi spesialisasi industri auditor menjadi dua yaitu: *overall expertise* dan *tax expertise*. Secara keseluruhan McGuire et al. (2012) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor yang mempunyai *overall expertise* terbukti mempunyai tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang lebih rendah, *discretionary permanent book-tax differences* yang lebih besar, dan *discretionary total book-tax differences* yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bukan *overall expertise*. Hasil ini sejalan ketika kualitas audit menggunakan ukuran *tax expertise*. McGuire et al. (2012) menyimpulkan bahwa auditor menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk mengarahkan kliennya dalam membuat perencanaan pajak yang optimal.

Apabila kualitas audit dikaitkan dengan kapabilitas dan independensi maka audit yang berkualitas mampu menemukan kecurangan dan mau mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Sedangkan dikaitkan dengan risiko reputasi maka auditor yang mempunyai kualitas yang baik akan membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam penghindaran pajak karena jika dikemudian hari perusahaan terbukti melakukan kejahatan pajak maka auditor juga akan menerima risiko, oleh karena diprediksikan bahwa audit yang semakin berkualitas mampu membatasi manajemen dalam melakukan *tax avoidance*, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Kualitas audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance***

## 2.5. Pengaruh CG level Negara terhadap Tax Avoidance

Pada level perusahaan, praktik *corporate governance* yang baik (*good- corporate governance*) efektif melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain praktik CG perusahaan, sangat penting bagi investor adalah memahami *corporate governance* pasar atau sering disebut sebagai CG makro. Dalam laporan survey yang dilakukan oleh *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) dan *The Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menyatakan bahwa saham dengan kinerja CG yang tinggi tidak selalu berarti lebih baik, karena investasi di suatu pasar (negara) tanpa kesadaran yang baik akan masalah *governance* ibarat melaju ditikungan yang licin tanpa memeriksa apakah remnya berfungsi dengan baik (CLSA, 2012). Dalam melakukan penilaian CG pasar CLSA menggunakan 5 kategori yaitu: *CG Rule and Practice, Enforcement, Political and Regulatory Environment, IGAAP, CG Culture*.

*Tax avoidance* mungkin saja dipengaruhi oleh implementasi aturan CG dan baik tidaknya implementasi CG suatu negara tentu saja dimulai ada tidaknya aturan yang baik tentang CG (*CG Rules*). Desai et al., (2007) menganalisis interaksi antara CG negara dengan system pajak menemukan bukti bahwa saat terjadi peningkatan tarif pajak, peningkatan pendapatan negara dari pajak hanya signifikan terjadi pada negara-negara yang memiliki factor CG yang baik. Siehl (2010) mengeksplorasi factor yang menjadi alasan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah: rendahnya kesediaan membayar pajak (*low tax morale*), rendahnya kemampuan administrasi pajak dan rendahnya pengadilan fiscal dalam penegakan ketentuan pajak. Dalam studi antar negara, Atwood et al.,(2012) menguji pengaruh *tax enforcement* terhadap *tax avoidance* menemukan hasil adanya pengaruh negative dari *tax enforcement* terhadap *tax avoidance*.

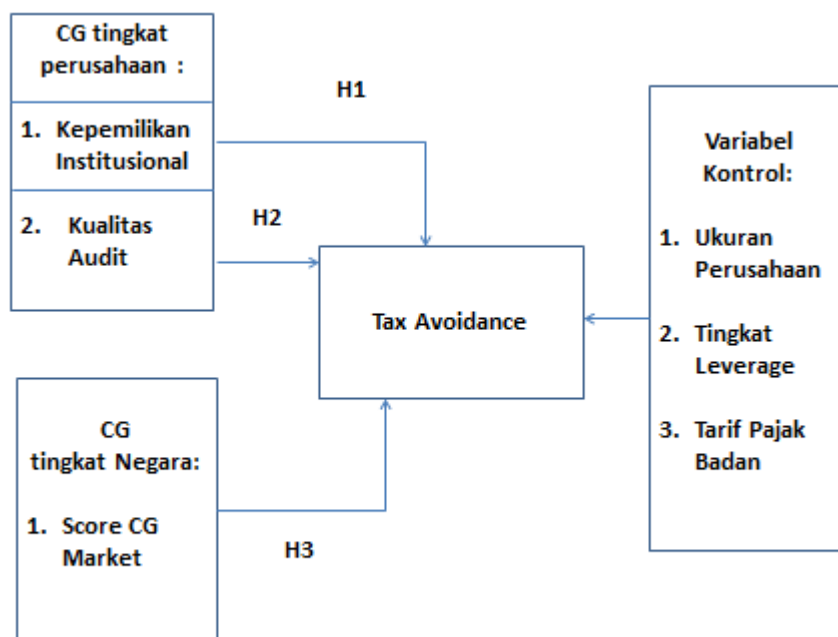
Penelitian tentang *culture* dan *tax system* dilakukan oleh Richardson (2008), dengan menggunakan variabel individualism, *uncertainty avoidance* dan *power distance* sebagai ukuran *culture* maka terbukti bahwa *culture* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara umum indikator baik buruknya praktik *corporate governance* suatu negara ditandai dengan adanya penegakan hukum dan aturan yang kuat termasuk peraturan perpajakan, hal ini telah terbukti pada beberapa penelitian yang ada, oleh karena itu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara dengan praktik *corporate*



*governance* yang semakin baik diprediksikan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, oleh karena itu hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Praktik *Corporate Governance* dalam suatu negara berpengaruh negative terhadap *tax avoidance***

Mengacu pada kerangka konseptual yang menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah masalah keagenan dan hipotesis yang dikembangkan maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Penelitian

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Sampel dan Data

Penelitian ini dilakukan secara lintas negara mencakup perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek pada lima negara di Asia yakni: Indonesia, Malaysia, Phillipina, Singapura dan Thailand dengan alasan kelima negara ini masuk dalam survei CLSA dan kesetaraan umur bursa. Kriteria pemilihan sampel adalah: 1). bukan perusahaan tambang dan migas, 2). bukan perusahaan kategori industri keuangan, 3). mempunyai laporan keuangan dengan data lengkap sesuai kebutuhan analisis

tahun 2010-2012. Sesuai kriteria sampel diperoleh sampel akhir sebanyak 2453 tahun perusahaan (firm years). Data keuangan, kepemilikan dan auditor diperoleh dari database Data stream Thomson Reuters. Sedangkan data skor CG negara diperoleh dari hasil survei SLCA.

### 3.2. Model Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model penelitian berupa persamaan regresi linear berganda dengan model *fix effect*. Pengolahan data menggunakan bantuan *software* Stata 13.

#### a. Model Penelitian

##### Model penelitian

$$\text{TAX\_AVit} = \alpha_0 + \alpha_1\text{INSTit} + \alpha_2\text{AUDITQit} + \alpha_3\text{CGMARit} + \alpha_4\text{SIZEit} + \alpha_5\text{LEVit} + \alpha_6\text{STRit} + \epsilon\text{it} \dots(1)$$

#### b. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

##### Variabel Dependen

*Tax Avoidance* perusahaan *i* periode *t* (TAX-AV<sub>it</sub>) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. TAX-AV<sub>it</sub> diukur dengan menggunakan dua ukuran yaitu *Discretionary Permanent Book-tax Differences* (discPBT<sub>Dit</sub>) dan *Discretionary Total Book-Tax Differences* (discTBTD<sub>it</sub>).

1). *discPBT<sub>Dit</sub>* mengacu pada Frank dan Rego (2009) yaitu residual dari persamaan berikut:

$$\text{PBTDit} = \beta_0 + \beta_1\text{INTANGit} + \beta_2\text{MIit} + \beta_3\text{CSTEit} + \beta_4\text{DP\_BTD}(t-1) + \epsilon\text{it} \dots(2)$$

PBT<sub>Dit</sub> adalah *permanent book-tax differences* perusahaan *i* periode *t* merupakan selisih antara total BTD<sub>it</sub> dikurangi temporary BTD<sub>it</sub>. *Total BTD* = *Book Income* – (*current tax expense/statutory tax rate*), dan nilai *temporary BTD* = *deferred tax expense/statutory tax rate*. *Nondiscretionary permanent book-tax differences* merupakan *fitted value* persamaan (2) yang menunjukkan perbedaan permanen yang disebabkan karena perlakuan yang berbeda dalam *intangible assets* (INTANG<sub>it</sub>), laba (rugi) dari minoritas (MI<sub>it</sub>), beban pajak kini (CSTE<sub>it</sub>), dan lagDP\_BTD. Sedangkan nilai residu ( $\epsilon\text{it}$ ) merupakan *discretionary permanent book-tax differences* (discPBT<sub>Dit</sub>) hasil diskresi manajemen. Semua variabel diskalakan dengan nilai *total asset* periode *t-1*.

2). *Discretionary Total Book-Tax Differences* mengacu model Tang dan Firth (2011)

$$TBTDit = \beta_0 + \beta_1\Delta INVESit + \beta_2\Delta REVit + \beta_3NOLit + \epsilon it \quad \dots(3)$$

TBTDit adalah *total book-tax differences* perusahaan i periode t yang diperoleh dari selisih antara *book income* – (*current tax expense/statutory tax rate*). *Non-discretionary book-tax differences* merupakan *fitted value* dari persamaan (3) diatas yang menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang disebabkan karena perbedaan perlakuan/peraturan antara akuntansi dengan aturan pajak terhadap perubahan nilai investasi yang mencakup *property, plant* dan *equipment* dan *asset* tidak berwujud ( $\Delta INVESit$ ) dan perubahan *revenue* ( $\Delta REVit$ ) dan adanya kerugian perusahaan ( $NOLit$ ). Sedangkan nilai residu ( $\epsilon it$ ) dari persamaan menunjukkan besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh diskresi manajemen yang disebut sebagai *discretionary total book-tax differences* ( $discTBTDit$ )

### **Variabel Independen**

1). Kepemilikan Institusional (INSTit)

INSTit adalah prosentase saham yang dimiliki oleh investor institusional perusahaan i periode t.

2). Kualitas Audit (AUDITQit)

AUDITQit adalah kualitas audit perusahaan i periode t, mengacu pada audit spesialisasi industri yang diukur dengan besarnya pangsa pasar yang dikuasai oleh auditor.

3). CG negara (CGMAR it)

CGMARit adalah kualitas CG negara dimana perusahaan i periode t berada, yang diukur dengan skore CG pasar hasil *survey CLSA* dan *ACGA* yang disajikan dalam *CG Watch*. Skore CG pasar CLSA merupakan nilai rata-rata dari lima komponen yang membangun kualitas CG suatu negara yakni: *CG Rule and Practices, Law Enforcement, Political and Regulatory Environment, IGAAP (accounting and auditing)*, dan *CG Culture*.

### **Variabel Kontrol**

1). Ukuran Perusahaan (SIZEit)

SIZE<sub>it</sub> adalah ukuran perusahaan *i* periode *t* diukur dengan nilai pasar ekuitas perusahaan *i* periode *t*.

2). Tingkat *Leverage* Perusahaan (LEV<sub>it</sub>)

LEV<sub>it</sub> adalah *leverage* perusahaan *i* periode *t*, yang diukur dengan nilai rasio antara total utang (utang jangka panjang + utang jangka pendek) terhadap total asset perusahaan *i* periode *t*.

3). *Statutory Tax Rate* (STR<sub>it</sub>)

STR<sub>it</sub> adalah besarnya *statutory tax rate* perusahaan *i* periode *t*, adalah tarif pajak badan yang berlaku.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Statistik Deskriptif

Nilai *mean* dari *tax avoidance* yang diukur dengan *discPBTD* sebesar 0.006880 dan *discTBTD* sebesar 0.003113, kedua ukuran menunjukkan angka yang positif menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel melakukan *tax avoidance* dengan indikasi laba komersial yang lebih tinggi dibandingkan laba fiskal. Rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan publik di Asean cukup tinggi (40,7%) dengan kepemilikan tertinggi sebesar 72%.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	discPBTD	discTBTD	INST	AUDITQ	Log CGMAR	LnSIZE	LEV	STR
Mean	0.006880	0.003113	0.407073	0.381302	1.742742	1.226288	0.428892	0.232484
Max	0.242061	0.131617	0.720000	0.670000	1.826070	6.021969	0.826267	0.300000
Min	-0.283860	-0.174320	0.000000	0.120230	1.591065	0.159795	0.072007	0.170000
Std.dev	0.062654	0.061852	0.238199	0.103909	0.097385	1.200275	0.214892	0.043270

Sumber: output stata 13

Variabel kualitas audit yang diukur dengan penguasaan pangsa pasar menunjukkan nilai *mean* 38% yang mengindikasikan auditor yang berkualitas (penguasaan pangsa pasar > 30%). Jika dilihat dari nilai penerapan praktik CG maka nilai tertinggi adalah negara Singapura sedangkan Indonesia memperoleh nilai CG terendah.

##### 4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengolahan data untuk uji hipotesis menggunakan bantuan software STATA 13, dengan model regresi linear *fix effect*. Hasil pengujian disajikan pada tabel 2. Hipotesis pertama (H1) menduga “Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*”. Dengan menggunakan ukuran *discretionary permanent BTD* diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditunjukkan dengan nilai t statistik sebesar 2.63, dengan probabilitas signifikansi sebesar 1%. Hasil ini berkebalikan dengan penelitian terdahulu (Moore, 2012; Desai dan Dharmapala, 2006). Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional justru mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance*, karena *tax avoidance* diukur dengan *discretionary permanent BTD* maka dapat diinterpretasikan bahwa *tax avoidance* ini dinilai oleh investor institusional sebagai upaya manajemen dalam efisiensi pajak.

Tabel 2. Hasil regresi pengujian hipotesis

Model Regresi							
TAX_AVit = $\alpha_0 + \alpha_1INSTit + \alpha_2AUDITQit + \alpha_3CGMARit + \alpha_4SIZEit + \alpha_5LEVit + \alpha_6STRit + \epsilon it$							
Variabel Independen	Prediksi arah	TAX_AVit = discPBTBTD			TAX_AVit = discTBTBTD		
		Koefisien	t	Prob>(t)	Koefisien	t	Prob>(t)
C		0.227032	1.16	0.247	0.697300	3.57	0.000***
INST	-	0.029513	2.63	0.009***	0.013983	1.25	0.211
AUDITQ	-	-0.013116	-2.47	0.014**	-0.008711	-1.65	0.100*
CGMAR	-	-0.136887	-1.79	0.074*	-0.383763	-3.50	0.000***
SIZE	-	0.013269	1.80	0.072*	-0.017745	-2.42	0.016**
LEV	-	-0.034548	-1.78	0.075*	-0.095201	-4.68	0.000***
STR	+	0.510072	2.74	0.006***	0.126942	0.08	0.494
Adjusted R-square		0.1174			0.2277		
F-statistik		6.1483 (4.38)			6.1483 (7.05)		
Prob (F-statsitik)		0.0002***			0.000***		
Number of observation		2453			2453		
Keterangan: *signifikan pada alpha 10%, **signifikan pada alpha 5%, ***signifikan pada alpha 1%. TAX_AVit adalah <i>tax avoidance</i> perusahaan i periode t yang diukur dengan <i>discretionary permanent BTD</i> dan <i>discretionary total BTBTD</i> , INST adalah kepemilikan institusional yang diukur dengan prosentase kepemilikan saham oleh investor institusional, AUDITQ adalah kualitas audit yang diukur dengan besarnya pangsa pasar yang dikuasai oleh auditor, CGMAR menunjukkan praktik CG di suatu negara dimana perusahaan berkedudukan yang diukur dengan menggunakan total skor CG pasar hasil survei CLSA dan AGGA, Size adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural nilai pasar ekuitas perusahaan, LEV adalah tingkat <i>leverage</i> perusahaan yang diukur dengan rasio perbandingan total utang terhadap total asset dan STR adalah <i>statutory tax rate</i> yang berlaku di negara dimana perusahaan berkedudukan.							

Sumber: output Stata 13

Ketika *tax avoidance* diukur dengan *discretionary total BTD* ternyata kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, ditunjukkan dengan besarnya nilai t statistik sebesar 1.25 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.211 (lebih besar dari 10%). Tang dan Firth (2011) menyatakan bahwa *total book-tax differences* menunjukkan selisih laba akuntansi dengan laba fiskal yang mengandung elemen perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Beda temporer tidak menggambarkan upaya penghematan pajak tetapi lebih menunjukkan upaya manajemen untuk mengatur laba komersial, dengan demikian *discretionary total BTD* tidak benar-benar menggambarkan upaya manajemen untuk penghematan pajak tetapi lebih menggambarkan upaya untuk mengatur dua hal yakni laba komersial dan laba fiskal. Hasil pengujian bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *discretionary total BTD* dapat diinterpretasikan bahwa investor institusional menilai *discretionary total BTD* tersebut bukan upaya efisiensi pajak yang sesungguhnya tetapi juga menggambarkan upaya lain dari manajemen yakni pengaturan laba komersial yang bisa saja mencerminkan tindakan oportunistik manajemen.

Hipotesis kedua (H2) yang diuji dalam penelitian ini adalah “Kualitas audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit secara signifikan mempunyai pengaruh negative terhadap *tax avoidance* baik diukur dengan *discretionary permanent BTD* maupun *discretionary total BTD*. Signifikansi hasil dapat dilihat pada besarnya nilai t statistik dan nilai probabilitas alpha masing masing (t sebesar -2.47 dan probabilitas alpha 1.4%) untuk *discretionary permanent BTD* dan (t sebesar -1.65 dan probabilitas alpha sebesar 10%) untuk *discretionary total BTD*.

Pengaruh negative signifikan dari kualitas audit terhadap *tax avoidance* dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik kualitas audit suatu perusahaan akan mampu membatasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Auditor eksternal mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme monitoring yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap diskresi manajemen. Meskipun *tax avoidance* tidak selalu bersifat melanggar aturan akan tetapi bisa menimbulkan konotasi negative. Jika mengacu pada Lim (2011) *tax avoidance* diartikan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan *loophole* peraturan pajak yang meskipun dilakukan secara legal akan tetapi seringkali mendapat sorotan kurang baik dari otoritas pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Hasil

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negative kualitas audit terhadap *tax avoidance* juga dapat diterjemahkan bahwa auditor yang berkualitas tidak menghendaki manajemen perusahaan kliennya melakukan tindakan penghindaran pajak karena jika nantinya ketahuan oleh aparat pajak maka auditor juga akan menerima risiko khususnya risiko reputasi.

Karena penelitian ini dilakukan dengan data lintas negara maka dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian pengaruh praktik *corporate governance* level negara. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Praktik *Corporate Governance* dalam suatu negara berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*”. Hasil pengujian menemukan bahwa praktik *corporate governance* level negara secara signifikan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* baik diukur dengan *discretionary permanent BTD* maupun dengan *discretionary total BTD*. Secara berturut turut nilai t statistic dan probabilitas alpha adalah ( t sebesar -1.79 dan probabilitas alpha sebesar 7.4%) untuk *discretionary permanent BTD* dan (t sebesar -3.50 dan probabilitas alpha sebesar 0.00%) untuk *discretionary total BTD*.

Temuan pengaruh negative praktik *corporate governance* level negara terhadap *tax avoidance* dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan praktik *corporate governance* yang baik cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut CLSA dan ACGA negara yang menerapkan praktik CG yang baik ditandai dengan adanya: 1). Adanya aturan CG dan penerapan yang baik, 2). Penegakan aturan yang kuat, 3). Kejelasan kebijakan dan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan, kewibawaan lembaga hukum dan kebebasan media, 4). Penerapan yang baik terhadap standar baik standar akuntansi maupun standar auditing, 5). Adanya budaya dan upaya menerapkan CG dengan baik dari seluruh *stakeholders* yang terlibat. Semakin tinggi skor praktik *corporate governance* level negara menunjukkan praktik CG yang semakin baik. Negara yang telah menerapkan praktik CG yang semakin baik mampu membatasi manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti (Richardson, 2008; Atwood et al., 2012).

Terdapat tiga variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini dimana secara umum variabel kontrol ini merupakan variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan (SIZE) dan tingkat leverage (LEV) digunakan sebagai variabel kontrol pada tingkat

perusahaan sedangkan *statutory tax rate* (STR) digunakan sebagai variabel kontrol pada level negara. Hasil pengujian terhadap variabel kontrol diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap *discretionary permanent BTD* tetapi berkebalikan ketika menggunakan *discretionary total BTD* ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh negative. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan semakin besar upaya untuk melakukan penghematan pajak yang tercermin pada *discretionary permanent BTD*, tetapi terhadap *discretionary total BTD* semakin besar perusahaan justru semakin rendah yang menunjukkan bahwa *discretionary total BTD* bukan benar-benar upaya penghematan pajak tetapi bisa saja lebih kepada upaya pengaturan laba yang bersifat oportunistik sehingga perusahaan yang besar cenderung untuk tidak melakukan karena semakin besar suatu perusahaan semakin menjadi sorotan.

Sesuai dengan prediksi tingkat *leverage* perusahaan (LEV) secara signifikan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan semakin tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dipahami karena keberadaan utang dalam suatu perusahaan itu sendiri sudah membawa dampak adanya penghematan pajak melalui pembayaran beban bunga utang. Tinggi rendahnya tarif pajak penghasilan badan (*Statutory Tax Rate*) secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara maka akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghematan pajak.

## **5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan**

### *5.1. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil penelitian ini mampu memberikan bukti secara signifikan peran praktik *corporate governance* baik level perusahaan maupun pada level negara dalam membatasi diskresi manajemen untuk penghindaran pajak pada perusahaan publik dilima negara Asean. Pada level perusahaan, auditor eksternal mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme monitoring eksternal terhadap tindakan manajemen dalam penghindaran pajak. Sedangkan pada level negara terbukti bahwa semakin baik praktik *corporate governance* suatu negara mampu membatasi manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun berkebalikan dengan



prediksi, pada level perusahaan keberadaan investor institusional justru mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil ini dapat dianalisis dari berbagai kemungkinan sudut pandang seperti: pertama, investor institusional berpersepsi bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah benar-benar upaya penghematan pajak sehingga perlu didukung, kedua, investor institusional pada perusahaan di negara Asia kemungkinan merupakan investor jangka pendek sehingga lebih mementingkan tujuan jangka pendek.

### 5.2. Implikasi Penelitian

Penelitian ini menemukan bukti adanya pengaruh praktik *corporate governance* baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat negara. Pada tingkat perusahaan terbukti kualitas audit mampu membatasi *tax avoidance*, pada tingkat negara praktik CG yang semakin baik juga mampu membatasi *tax avoidance*, tetapi pengaruh kepemilikan institusional tidak sesuai prediksi dan berkebalikan dengan hasil penelitian sebelumnya. Pengaruh kepemilikan institusional juga tidak konsisten terhadap ukuran *tax avoidance* yang berbeda. Hasil penelitian ini membawa beberapa implikasi sebagai berikut: 1). untuk pengembangan literature *tax avoidance* dalam kerangka teori keagenan, penelitian ini telah memberikan kontribusi, namun riset selanjutnya masih perlu lebih cermat dan hati-hati dalam pengukuran variabel. 2). Bukti empiris adanya pengaruh negative kualitas audit terhadap *tax avoidance* membawa implikasi bahwa sangat penting bagi stakeholders perusahaan untuk mempertimbangkan pemilihan auditor eksternal. 3). Bukti adanya pengaruh negative praktik *corporate governance* tingkat negara terhadap *tax avoidance* membawa implikasi bagi regulator suatu negara untuk bisa mendorong peningkatan kualitas CG karena mampu membatasi tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan.

### 5.3. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan seperti : 1). pengukuran *tax avoidance* menggunakan *discretionary book-tax differences* baik yang bersifat permanen maupun total. Meskipun ukuran ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan ukuran tarif pajak efektif (*effective tax rate*), namun tetap bukan merupakan ukuran yang menggambarkan upaya penghindaran pajak secara riil. Secara riil upaya penghindaran pajak ditunjukkan dari besarnya kekurangan pajak yang dibayar yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan tetapi data riil ini sangat sulit untuk

didapatkan. 2). pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan prosentase kepemilikan saham oleh investor institusional yang bersumber dari *database data stream Thompson Reuther* dimana kepemilikan institusional pada data base tersebut hanya mencakup: dana pension dan perusahaan investasi tidak mencakup kepemilikan oleh lembaga perbankan. Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan ukuran kepemilikan institusional yang lebih lengkap. 3). Sampel penelitian ini hanya dibatasi pada 5 negara anggota di Asia, penelitian kedepan akan lebih baik jika menggunakan observasi jumlah negara yang lebih banyak lagi sehingga kesimpulan yang diambil lebih bersifat general.

## Referensi

- Atwood, T.J., Michael, S. Drake, James, N., Myers dan Linda, A. Myers, 2012, Home Country Tax System Characteristics and Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*, 87,6, p. 1831-1860
- Beale, L.M, 2004, Symposium: Evaluation and Response to Risk by Lawyers and Accountants in US and EU, *Iowa Journal of Corporate Law*, 29, 219
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng dan Terry Shevlin, 2010, Are Family More tax Aggressive than Non-Family Firms ?, *Journal of Financial Economics*, 95, p. 41-61.
- CLSA, 2012, *Tremors and Cracks, Governance Issue and Cracks*, CG Watch, HongKong
- Crocker, Keith,J., dan J. Slemrod, 2005, Corporate Tax Evasion with Agency Costs, *Journal of Public Economics*, 89,p.1593-1610
- Darussalam, Hutagaol dan Septriadi, 2010, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, Danny-Darussalam Tax Center.
- DeAngelo, Linda Elizabeth, 1981, Auditor Size and Audit Quality, *Journal of Accounting and Economics*, 3,p. 183-199
- Desai, M dan Dharmapala, D., 2006, Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives, *Journal of Finance Economic*, 79.p.145-179.
- Desai, M dan D. Dharmapala, 2007, *Taxation and Corporate Governance: An Economics Approach*, the Conference on Taxation and Corporate Governance at the Max Planck Institute in Munnich, SSRN,p.1-23
- Desai, M., A. Dyck dan L. Zingales, 2007, Theft and Taxes, *Journal of Financial Economics*, 84, p. 591-623
- Frank, M.M., Luann J. Lynch dan S.O. Rego, 2009, Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting, *The Accounting Review*, 80,4,p. 467-496
- Friese, A., Simon, L. dan S. Mayer, 2006, *Taxation and Corporate Governance- The State of The Art*, Tax and Corporate Governance, Munich, Berlin, p. 357-425
- Hanlon, M., dan Heitzman, S., 2010, A Review of Tax Research, *Journal of Accounting and Economics*, 50, p.127-178.
- Koh Sun Yun, Seun-Young Park dan Jong Su Han, 2010, *Conformity between the Book Income & Taxable Income of Family Firms, and its Value Relevance: Empirical Evidence from Korea*, the 12th Asian Academic Accounting Association, Bali-Indonesia, p.1-29
- Lanis, Roman dan Grant Richardson, 2011, The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness, *Journal of Accounting and Public Policy*, 30,p 50-70
- Lim, YD. ,2011, Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, p.456-470.
- Mc.Quire, S., T. Omer, dan D. Wang, 2012, Tax Avoidance: Do Industry Experts Make A Difference?, *The Accounting Review*, 87, p. 975-1003
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga, 2010, Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?, *Journal of Corporate Finance*, 16, p.703-718
- Moore, Jared A., 2012, *Empirical Evidence on the Impact of External Monitoring on Book-Tax Differences*, *Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting*, xxx (article in press), xxx-xxx
- Richardson, G., 2008, The Influence of Culture on Tax System Internationally: A Theoretical Empirical Analysis, *Journal of International Accounting Research*, 6,1,p. 57-79

- Richardson, G. , G., Taylor dan R. Lanis, 2013, The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis, *Journal of Accounting and Public Policy*, 32,p. 68-88
- Richardson, G., R. Lanis dan S. Chi-Moon Leung, 2014, Corporate Tax Aggressiveness, Outside Directors and Debt Policy: An Empirical Analysis, *Journal of Corporate Finance*, 25,p. 107-121
- Scholes, Myron S., Mark A. Wolfson, Ericson M., Maydew E.L. dan terry Shevlin, 2005, *Taxes and Business Strategy, A Planning Approach*, Prentice Hall, Inc.
- Shackelford, D.A dan terry Shevlin, 2001, Empirical Tax Research in Accounting, *Journal of Accounting and Economics*, 31,p. 321-386
- Shleifer, A. dan R.W., Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, *The Journal of Finance*, LII, 2.p. 737-783
- Siehl, Elke, 2010, *Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance In Developing Countries, International Tax Compact, Germany*, GIZ-GmbH
- Slemrod, J., 2004, The Economics of Corporate Tax Selfishness, *National Tax Journal*, 4, p.877-899
- Tang, T. dan Firth, M., 2011, Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China, *The International Journal of Accounting*, 46,p. 175-204
- Watts, R.L. dan J.L., Zimmerman, 1986, *Positive Accounting Theory*, New York: Orentice Hall

## Appendiks

### 1. Penyebaran Sampel penelitian per negara per tahun

Negara	Jumlah perusahaan sampel			Total tahun perusahaan
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	
Indonesia	80	102	105	287
Malaysia	359	366	349	1074
Phillipina	41	43	44	128
Singapura	244	238	243	725
Thailand	53	78	108	239
Total	777	827	849	2453

### 2. Hasil pengolahan Stata 13

```
. xtreg atr1 inst auditq1 cgmar size lev str, fe

Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =   2453
Group variable: id                    Number of groups =   964

R-sq:  within = 0.1174                Obs per group:  min =    1
      between = 0.0021                    avg =    2.5
      overall  = 0.0000                    max =    3

                                F(6,1483)   =   4.38
corr(u_i, Xb) = -0.7349              Prob > F    =  0.0002
```

---

atr1	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
inst	.0295132	.011202	2.63	0.009	.0075397 .0514867
auditq1	-.0131165	.0053055	-2.47	0.014	-.0235235 -.0027094
cgmar	-.1968875	.1099465	-1.79	0.074	-.4125547 .0187797
size	.0132693	.007362	1.80	0.072	-.0011717 .0277103
lev	-.0345486	.019403	-1.78	0.075	-.0726088 .0035116

```

      str | .5100721 .1859135  2.74 0.006  .1453908 .8747535
    _cons | .2270324 .1960302  1.16 0.247  -1.1574936 .6115585
-----+-----
sigma_u | .04735561
sigma_e | .04198525
rho     | .55989446 (fraction of variance due to u_i)
-----+-----
F test that all u_i=0:   F(963, 1483) =  1.31      Prob > F = 0.0000

```

```
. xtreg atr2 inst auditq1 cgmar size lev str, fe
```

```

Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =  2453
Group variable: id                    Number of groups =   964

R-sq:  within = 0.2277                Obs per group:  min =    1
      between = 0.0010                  avg           =   2.5
      overall  = 0.0000                  max           =    3

```

```

corr(u_i, Xb) = -0.6563                F(6,1483)      =  7.05
                                          Prob > F       = 0.0000

```

```

-----+-----
      atr2 |   Coef.   Std. Err.    t    P>|t|   [95% Conf. Interval]
-----+-----
      inst | .0139833 .0111771    1.25  0.211   -0.0079412 .0359079
auditq1 | -0.0087106 .0052937   -1.65  0.100   -0.0190945 .0016733
      cgmar | -0.3837627 .1097017   -3.50  0.000   -0.5989498 -0.1685756
      size | -0.0177474 .0073456   -2.42  0.016   -0.0321562 -0.0033386
      lev  | -0.0905201 .0193598   -4.68  0.000   -0.1284955 -0.0525446
      str  | .1269423 .1854996    0.68  0.494   -0.2369272 .4908119
    _cons | .6973005 .1955939    3.57  0.000   .3136305  1.080971
-----+-----
sigma_u | .05128654
sigma_e | .04189178
rho     | .59981088 (fraction of variance due to u_i)
-----+-----
F test that all u_i=0:   F(963, 1483) =  1.98      Prob > F = 0.0000

```